

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh

1 – 31 Mei 2007



Bank Dunia/DSF

Pelemparan-pelemparan granat misterius, yang mulai bulan lalu, terus berlanjut bulan ini dengan empat insiden baru, sehingga jumlah insiden granat menjadi sembilan kasus.¹ Sasaran pelemparan pada bulan Mei adalah kantor dan rumah pejabat pemerintah, sama dengan yang terjadi pada bulan April, tetapi kebanyakan insiden bulan Mei terjadi di Aceh Tengah/Bener Meriah daripada di pantai timur. Semua pelemparan tersebut masih belum terpecahkan, tetapi diduga bahwa perebutan sumber daya, seperti proyek bantuan dan illegal logging, merupakan isu utama di balik insiden-insiden itu. Pada bulan ini tercatat 107 insiden konflik tingkat lokal. Dari 18 insiden yang melibatkan kekerasan, beberapa di antaranya memperlihatkan perpecahan-perpecahan sosial yang terus berlanjut. Yang paling memprihatinkan adalah dua kasus penculikan. Insiden-insiden ini menunjukkan adanya kurang kepercayaan antara mantan kombatan dan kelompok lain, yang perlu ditindaklanjuti. Laporan Pemantauan kali ini juga melaporkan tentang konflik terkait bantuan dan insiden “main hakim sendiri”, termasuk beberapa kejadian di mana warga yang menangkap pelaku khalwat sempat melakukan kekerasan dalam bentuk yang baru.

Kekerasan politik berlanjut dengan pelemparan granat misterius

Rangkaian peristiwa pelemparan granat misterius terus berlanjut pada bulan Mei, dengan dua ledakan dan dua insiden lain di mana alatnya gagal meledak. Salah satu alat yang tidak meledak tersebut dikira dimaksudkan sebagai peringatan, namun yang satunya sepertinya benar-benar dimaksudkan untuk diledakkan (lihat Kotak 1). Beruntung tidak ada korban luka dalam insiden-insiden ini.

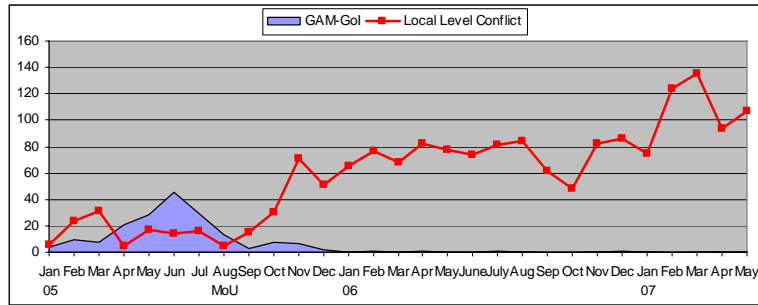
Kotak 1: Insiden granat bulan Mei

- *3 Mei, rumah ketua DPRD, Sigli, Pidie.* Sebuah bom dengan penunjuk waktu ditemukan di kolam ikan di halaman rumah. Bom tersebut tampaknya dimaksudkan untuk diledakkan, tetapi ketika dilempar di atas pagar ternyata granat tersebut jatuh ke kolam ikan dan menjadi tidak aktif. Kepolisian Sigli mengatakan bahwa mereka menerima pesan telepon anonim yang mengatakan bahwa ada bom di rumah ketua DPRD. Dua orang ditangkap dekat tempat kejadian, tetapi kemudian dilepaskan.
- *14 Mei, 23:50, gedung DPRD, Redelong, Bener Meriah.* Sebuah ledakan granat merusakkan gedung tetapi tidak menyebabkan korban. Setelah peledakkan tersebut, saksi-saksi mengaku melihat sebuah mobil meluncur meninggalkan tempat kejadian. Kemudian, Bupati Bener Meriah H. Tagore Abubakar meminta agar pam swakarsa, yang aktif selama periode konflik, diaktifkan kembali.
- *15 Mei, beberapa menit setelah tengah malam, kantor Camat Bies, Aceh Tengah.* Sebuah granat memantul ke pintu kemudian meledak, merusakkan gedung namun tidak menyebabkan korban. Saat itu banyak staf sedang di kantor, menyusun proposal untuk proyek BRR. Seorang saksi mengaku melihat dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor menjauhi tempat kejadian.
- *15 Mei, kantor Camat Pegasing, Aceh Tengah.* Sebuah granat asap tidak aktif ditemukan di depan kantor.

¹Sebagai bagian dari program dukungan analisis bagi proses perdamaian, Program Konflik dan Pengembangan di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden konflik di Aceh yang diberitakan di sua surat kabar daerah (serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, sejauh mungkin didukung oleh kunjungan ke lapangan, yang terangkum dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Laporan Pemantauan bulanan dapat diakses melalui: www.conflictanddevelopment.org. dataset tersedia bagi yang membutuhkan, dengan menghubungi Blair Palmer di: bpalmer@worldbank.org. Terdapat keterbatasan dalam menggunakan surat kabar untuk memetakan konflik, lihat Patrick Barron dan Joanne Sharpe (2005) “Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia”, *Indonesian Social Development Paper* No. 7. Jakarta: World Bank.

Semua insiden, termasuk yang terjadi bulan lalu, masih tetap tidak terpecahkan, sehingga kami tidak mengkategorikannya sebagai insiden GAM/RI (lihat Figur 1).²

Figur 1: Konflik GAM-RI dan tingkat lokal per bulan



Pada bulan Mei, tiga dari empat insiden granat terjadi di Aceh Tengah dan Bener Meriah (insiden lainnya terjadi di Pidie). Wawancara-wawancara dengan informan lokal mengindikasikan bahwa perebutan atas sumber daya ekonomi, khususnya kontrol terhadap dana bantuan dan

illegal logging, tampaknya adalah penyebab utama insiden-insiden di Aceh Tengah dan Bener Meriah, serupa dengan kesimpulan kami untuk insiden bulan April di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Meski demikian, konteks politik di pedalaman Aceh berbeda dengan yang ada di daerah pantai timur. Di Aceh Tengah dan Bener Meriah, kelompok milisi pro-Indonesia lebih kuat dibanding GAM/KPA, dan kandidat yang berafiliasi dengan KPA tidak berhasil menang di pilkada. Kelemahan dan perpecahan dalam tubuh KPA di Bener Meriah disebut-sebut oleh informan sebagai salah satu faktor dalam pelemahan ini. Pemimpinnya (dan kandidat Bupati yang kalah) Fauzan Azima telah berpindah tugas ke Banda Aceh, dan anggota KPA Bener Meriah disebut-sebut terbagi dan pesimis tentang masa depan mereka. Disebutkan juga bahwa terdapat ketegangan antara polisi dan KPA, setelah sebuah LSM, yang banyak anggotanya adalah anggota KPA, membantu membongkar keterlibatan polisi dalam kasus illegal logging.

Selisih waktu antara insiden di Bener Meriah dan di Aceh Tengah mengindikasikan bahwa pelakunya lebih dari satu; jaraknya terlalu jauh untuk mencakup kedua tempat hanya dalam waktu yang singkat antara dua ledakan. Seperti di tempat lain di Aceh, kemungkinan ada elemen KPA, GAM yang menyerah, dan anggota organisasi anti-separatis yang tidak berhasil mengakses dana reintegrasi. Kemungkinan juga terdapat pasukan keamanan dan birokrat yang keuntungannya dari illegal logging sedang terancam. Bisa diperkirakan bahwa kurangnya kekompakan dalam tubuh KPA akan terus-menerus menyebabkan konflik, demikian juga perebutan akses terhadap proyek-proyek bantuan dan illegal logging. Kemungkinan bahwa proyek bantuan ikut menyebabkan konflik memperkuat kebutuhan akan prosedur tender yang adil dan transparan, yang mungkin akan mengurangi kolusi dan mendorong pelaku tender yang kalah supaya menerima hasilnya. Untuk sengketa yang terkait illegal logging, para donor yang mendukung anti-logging seharusnya menyadari potensi konflik yang mungkin terjadi; penelitian dan pemetaan terhadap metode, pihak-pihak yang terlibat, dan jaringan pendukung yang terlibat dalam logging akan membantu.

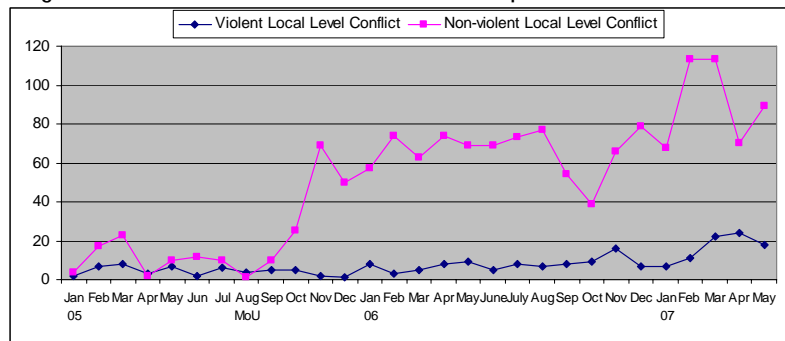
Kekerasan mencerminkan perpecahan sosial; penculikan menunjuk kurangnya kepercayaan

Pada bulan Mei terlihat adanya peningkatan konflik tingkat lokal dengan 107 insiden (lihat Figur 2). Dari jumlah itu, 18 melibatkan kekerasan. Ini merupakan penurunan dari bulan lalu, tetapi konflik kekerasan tetap tinggi dibanding tahun lalu.

² 'Insiden GAM-Gol' adalah insiden dimana kedua belah pihak terlibat dalam insiden kekerasan ketika mereka berperan sebagai angkatan bersenjata. Dengan adanya mantan GAM yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan di tingkat propinsi dan di beberapa kabupaten, terdapat ambiguitas dalam pengkategorian "konflik GAM/RI".

Insiden kekerasan terus memperlihatkan perpecahan sosial pada masyarakat Aceh. Bulan ini beberapa insiden yang terjadi menyoroti, dan memiliki potensi untuk memperburuk, ketegangan antara kelompok-kelompok seperti KPA, pasukan keamanan, dan masyarakat. Insiden-insiden ini dapat dilihat pada Tabel 1.³

Figur 2: Konflik kekerasan dan non-kekerasan lokal per bulan



Tabel 1: Perpecahan pra-MoU yang terlihat dalam insiden konflik paska-MoU bulan Mei

| Perpecahan | Insiden bulan ini |
|--|---|
| GAM vs. GoI | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Penculikan dan penyiksaan, 31 Mei, Lhokseumawe.</i> Aceh Kita melaporkan bahwa seorang buruh bangunan diculik oleh empat orang laki-laki dengan menggunakan mobil. Dengan tangan diborgol dan mata tertutup kain ia dibawa ke lokasi yang tidak diketahui dan disandera selama lima hari. Selama dalam penyanderaan ia disiksa dengan besi panas, sengatan listrik, dan pukulan. Korban pernah dipenjara karena membantu GAM pada masa konflik. Ia melaporkan bahwa penyiksa bertanya lokasi gudang senjata GAM. • <i>Sengketa tender, 8 Mei, Aceh Barat Daya.</i> Sebuah kontroversi muncul terkait keinginan KPA untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kontrak BRB. Kapolres Aceh Barat Daya merespon dengan mengatakan bahwa tender terbuka untuk siapa saja, dan bahwa KPA jangan mengganggu proses tender. |
| Kelompok anti-separatis vs. masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Penangkapan oleh warga, 19 Mei, Pante Kuyun, Aceh Jaya.</i> Masyarakat menangkap seorang pemuda karena memiliki pistol, dan menyerahkan pemuda tersebut kepada KPA. Pemuda itu diidentifikasi sebagai mantan kombatan yang menyerah, yang sudah bergabung dengan sebuah “organisasi tertentu”. |
| GAM vs. masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Penculikan, 13 Mei, Sabang.</i> Dua orang laki-laki melaporkan dirinya diculik oleh tiga orang anggota KPA. Mereka diculik selama 10 hari dan dipaksa mengaku berencana membunuh ketua KPA Sabang. Setelah insiden itu dilaporkan, ketiga pelaku ditangkap oleh polisi; mereka mengatakan bahwa penculikan itu dilakukan untuk mencegah kedua korban membunuh ketua KPA. |
| Polisi/TNI vs. masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemukulan, 19 Mei, Nagan Raya.</i> Setelah sebuah kecelakaan lalulintas ringan dengan seorang istri petugas Brimob, seorang anggota DPRD NAD dihadang di depan kantor polisi, kemudian dipukuli oleh seorang Brimob. |

Kedua penculikan itu sangat mengkhawatirkan. Bulan lalu, satu insiden penculikan di Langsa mengingatkan atas kemungkinan terjadinya balas-membalas dendam berkaitan dengan masa konflik.⁴ Salah satu kelebihan dari proses perdamaian Helsinki di Aceh adalah bahwa insiden balas dendam seperti itu nyaris tidak ada; hal positif ini harus dilestarikan dengan secepat mungkin menuntaskan insiden-insiden yang sempat terjadi. Inisiatif untuk membangun kepercayaan antara KPA dan satuan keamanan sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah bekas kekuatan GAM; kurangnya kepercayaan ikut memberi kontribusi besar dalam insiden Nisam dan insiden Sawang di Aceh Utara pada bulan Maret.⁵

³ Lihat Laporan Pemantauan bulan November 2006 untuk informasi lebih jelas tentang perpecahan-perpecahan ini. Semua Laporan Pemantauan tersedia di: www.conflictanddevelopment.org.

⁴ Lihat Laporan Pemantauan April 2007.

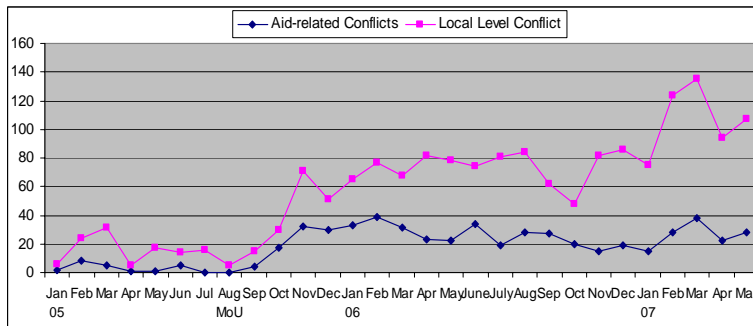
⁵ Lihat Laporan Pemantauan Maret 2007.

Konflik terkait bantuan terus berlanjut

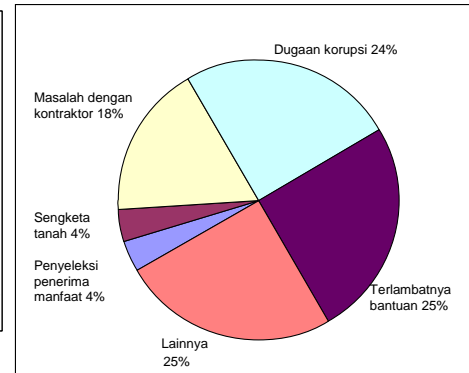
Bulan ini 28 konflik, lebih dari seperempat jumlah konflik tingkat lokal, adalah terkait dengan program bantuan (lihat Figur 3). Dari 28 konflik terkait bantuan, 11 diantaranya terkait dengan kinerja BRR. Figur 4 memberi rincian tentang jenis konflik terkait bantuan pada bulan Mei. Tiga masalah yang paling utama adalah keterlambatan penyerahan bantuan, (dugaan) korupsi, dan masalah dengan kontraktor.

Beberapa insiden merupakan jenis ancaman baru terhadap para donor. Pada 23 Mei, sebuah kendaraan milik Palang Merah Kanada (PMK) dihadang ketika melintas di desa Kuto Baro menuju Calang. Petugas PMK dipaksa turun, dibawa ke balai desa, dan diminta menetapkan tanggal yang pasti kapan mereka akan selesai membangun rumah-rumah yang katanya sudah dijanjikan. Setelah empat jam, dan dengan campur tangan Wakil Bupati, orang PMK itu akhirnya diperbolehkan meneruskan perjalanan. “Negosiasi paksa” ini memperlihatkan tingkat tekanan yang baru supaya memenuhi harapan masyarakat dalam hal bantuan.

Figur 3: Konflik terkait bantuan per bulan



Figur 4: Rincian konflik terkait bantuan bulan Mei



Yang lebih mengkhawatirkan adalah tiga kasus perampokan bersenjata dengan dana bantuan sebagai sasaran yang terjadi bulan ini. Pada 23 Mei, di Sawang, Aceh Utara, sekelompok orang menghadang mobil CARDI, berusaha memeras Rp. 30 juta (US\$ 3300) dari petugasnya, kemudian merampas mobil karena tidak berhasil mendapatkan uang. Dua perampokan bersenjata lainnya tampaknya memang ditargetkan untuk mencuri dana reintegrasi. Petugas kantor Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Bank Dunia/RI di Sawang, Aceh Utara dirampok dalam dua insiden terpisah, yaitu pada tanggal 7 dan 11 Mei.⁶ Kedua insiden itu dilakukan oleh pelaku bersenjata yang menggunakan penutup wajah dan mengendarai sepeda motor RX King hitam tanpa plat kendaraan. Staf PPK membantu dalam menyalurkan dana bantuan reintegrasi melalui program BRA-PPK bagi korban konflik; korban mengaku yakin bahwa perampok berusaha mengambil dana reintegrasi. Aceh Utara, dan kecamatan Sawang khususnya, adalah tempat yang semakin berbahaya bagi donor.⁷ Staf proyek PPK sudah beberapa kali mengalami upaya pemerasan oleh mantan kombatan, dan merasa bahwa ada sejumlah mantan kombatan yang tidak tergabung dalam struktur KPA, tidak tunduk pada pemimpin KPA, dan kemungkinan terlibat dalam upaya perampokan itu.

⁶ Insiden ini tidak muncul di surat kabar; korban tidak melapor ke polisi karena diancam oleh perampok.

⁷ Perampokan lain terhadap staf BRA-PPK terjadi di Seunuddon, Aceh Utara, pada bulan Maret dimana perampok berhasil merampas Rp. 62 juta dana proyek. Selebihnya baca Laporan Pemantauan bulan Maret 2007.

Insiden “main hakim sendiri”: kekerasan dilakukan terhadap pelaku khalwat

Bulan ini terdapat 13 insiden “main hakim sendiri”, enam diantaranya dengan kekerasan. Hanya dua diantaranya yang berupa pengeroyokan terhadap maling, sebuah penurunan dari bulan lalu yang ada tujuh insiden pengeroyokan maling. Insiden “main hakim sendiri” bulan ini terjadi dalam beberapa jenis; bersama, mereka memperlihatkan beberapa resiko terkait dengan aksi main hakim sendiri itu.

Pada dua kejadian, sekelompok laki-laki yang dikira murid pesantren membubarkan secara paksa acara tertentu; satu pertemuan pengajian dan lainnya adalah acara rekreasi. Ini merupakan keterlibatan taktik preman dalam debat mengenai perilaku agama yang seharusnya. Di Pidie, seorang laki-laki dibunuh setelah dituduh sebagai dukun ilmu hitam; barangkali ini memperlihatkan keinginan untuk mencari kambing hitam untuk penderitaan yang dialami. Pada dua kasus bulan ini, para pemuda yang melakukan penangkapan terhadap pelaku khalwat dilaporkan melakukan tindak kriminal (lihat Kotak 2). Insiden-insiden ini menggarisbawahi kerentanan masyarakat ketika warga diperbolehkan melakukan tugas polisi.

Terakhir, penangkapan pelaku khalwat oleh petugas WH (Wilayah Hisbah) juga mengundang kontroversi. Pada tanggal 5 Mei di Aceh Tamiang, tujuh orang petugas WH ditahan oleh sekelompok 50 orang setelah menangkap pasangan karena melakukan khalwat. Pelaku menuntut agar kedua muda-mudi itu dilepaskan. Mereka mengaku kesal karena seorang anggota DPRD yang ditangkap karena berlaku khalwat lima bulan lalu, dan sudah diputuskan hukumannya, belum juga dijatuhi hukuman cambuk (anggota DPRD tersebut mengajukan banding). Petugas WH dilepaskan beberapa jam kemudian, setelah kedua muda-mudi dilepaskan. Insiden ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin memastikan bahwa kekuasaan WH tidak digunakan hanya untuk menindas pihak yang miskin dan tidak berdaya.

Kotak 2: Menyalahgunakan kekuasaan dalam insiden penangkapan khalwat

- *Pemerasan khalwat, desa Batee Tunggai, Aceh Selatan, 28 Mei.* Sepasang muda-mudi yang sedang duduk bersama di pantai ditangkap oleh enam orang pemuda yang menuduh mereka melakukan khalwat, dan mengancam akan dilaporkan bila mereka tidak membayar Rp. 2.5 juta (US\$ 280). Korban laki-laki pergi mengambil uang sedang korban perempuan ditahan oleh para pelaku di pantai. Ke-enam pemuda itu kemudian ditangkap oleh polisi. Dari investigasi polisi ditemukan bahwa tiga diantara mereka adalah anggota KPA, dan mengaku sudah sering melakukan pemerasan serupa.
- *Video khalwat, Lhok Nga, Aceh Besar, 25 Mei.* Sebuah video yang disebarakan melalui telepon genggam dan internet memperlihatkan sepasang muda-mudi dipaksa melakukan tindakan seksual oleh sekelompok laki-laki berjumlah kurang lebih 15 orang. Para pelaku tampaknya menangkap pasangan muda-mudi itu dalam posisi khalwat, kemudian dengan ancaman akan dilaporkan ke orang tua mereka dan wartawan, mereka memaksa muda-mudi itu beraksi di depan kamera.